



BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 100.3.3.2 / 1 / TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PARA PEJABAT YANG DITUNJUK DAN DIBERI WEWENANG SEBAGAI
PENGUNA ANGGARAN, KUASA PENGUNA ANGGARAN, PENANDATANGANAN
SURAT PERINTAH MEMBAYAR, BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA
PENGELUARAN PEMBANTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KATINGAN TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12, Pasal 13, Pasal 21 dan Pasal 22 Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan para pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang sebagai Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Katingan ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

9/1

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 76);

9/11

13. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 83);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 99);
15. Peraturan Bupati Katingan Nomor 54 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Tahun 2024 Nomor 822);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PARA PEJABAT YANG DITUNJUK DAN DIBERI WEWENANG SEBAGAI PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR, BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU** : Menunjuk Pegawai yang Nama, Pangkat, Golongan seperti tertera pada kolom 3, sesuai Jabatan pada kolom 4, sebagai Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah pada kolom 5, sebagai Pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang sebagai Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini, khusus untuk jabatan sebagai Pengguna Anggaran Perangkat Daerah seperti tertera pada Kolom 3 Melekat pada Jabatan Eselon II;
- KEDUA** : Pegawai tersebut dianggap cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya sebagai Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah;
- KETIGA** : Tugas dan tanggung jawab para pejabat yang ditunjuk pada diktum KESATU agar berpedoman pada Pasal 12, Pasal 13, Pasal 21 dan Pasal 22 Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- KEEMPAT** : Apabila terjadi pergantian pegawai karena mutasi maka Jabatan Pengelolaan Keuangan Daerah secara otomatis melekat pada jabatan yang bersangkutan;
- KELIMA** : Terjadi Pergantian Pegawai sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT yang mengakibatkan terjadinya kekosongan Pejabat atau berhalangan yang bersifat sementara, maka tanggung jawab kewenangan secara otomatis dilimpahkan kepada atasan langsung sebagai Pengguna Anggaran, untuk pergantian Pejabat dapat dilakukan usulan Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan kepada Bupati Katingan untuk ditunjuk dan ditetapkan kembali dengan Keputusan Bupati Katingan;

9/11

- KEENAM : Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran diberi pendelegasian kewenangan untuk menunjuk Bendahara Pengeluaran sementara pada masing-masing Perangkat Daerah apabila Bendahara Pengeluaran yang sudah ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati tersebut dinyatakan berhalangan dalam melaksanakan tugas, Tugas dan Kewenangan dari Bendahara tersebut diserahkan sepenuhnya kepada Pengguna Anggaran, apabila Bendahara Pengeluaran yang tercantum dalam Surat Keputusan Bupati tersebut lebih dari 3 (tiga) bulan belum dapat melaksanakan tugas, maka yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri atau berhenti dari Jabatan sebagai Bendahara Pengeluaran dan Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran agar segera mengusulkan pengganti dengan alasan dan pertimbangan yang jelas;
- KETUJUH : Spesimen Tanda Tangan, Paraf dan Cap Stempel Dinas agar disampaikan kepada Bupati Katingan u.p. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah;
- KEDELAPAN : Penetapan Pejabat sebagaimana yang disebutkan pada kolom 5 Lampiran Keputusan ini, dilimpahkan kewenangannya kepada Kepala Perangkat Daerah;
- KESEMBILAN : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah masing-masing Tahun Anggaran 2025;
- KESEPULUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 02 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal 2 Januari 2025



Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta :
 - u.p. a. Inspektur Jenderal;
 - b. Direktur Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah.
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta :
 - u.p. Direktur Jenderal Dana Perimbangan Keuangan.
3. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia di Jakarta:
 - u.p. Kepala Perwakilan Badan Pemeriksaan Keuangan.
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan di Kasongan;
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan di Kasongan :
 - u.p. Kepala Bagian Hukum;
6. Inspektur Kabupaten Katingan di Kasongan;
7. Kepala Cabang PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah di Kasongan;
8. Semua Kepala Perangkat Daerah di Kabupaten Katingan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 100.3.3.2 / 1 / TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN PARA PEJABAT YANG DITUNJUK DAN DIBERI WEWENANG
SEBAGAI PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN,
PENANDATANGANAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR, BENDAHARA
PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN ANGGARAN
2025

NOMOR	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	JABATAN	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN	KETERANGAN
1	2	4	5	6
1	SEKRETARIAT DAERAH	SEKRETARIS DAERAH	PENGGUNA ANGGARAN PEJABAT PENANDA TANGAN SPM	
		KEPALA BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN PEJABAT PENANDA TANGAN SPM	PADA BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
		KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	KUASA PENGGUNA ANGGARAN PEJABAT PENANDA TANGAN SPM	PADA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
		KEPALA BAGIAN HUKUM	KUASA PENGGUNA ANGGARAN PEJABAT PENANDA TANGAN SPM	PADA BAGIAN HUKUM
		KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	KUASA PENGGUNA ANGGARAN PEJABAT PENANDA TANGAN SPM	PADA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
		KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN PEJABAT PENANDA TANGAN SPM	PADA BAGIAN PEMERINTAHAN
		KEPALA BAGIAN ORGANISASI	KUASA PENGGUNA ANGGARAN PEJABAT PENANDA TANGAN SPM	PADA BAGIAN ORGANISASI
		KEPALA BAGIAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	KUASA PENGGUNA ANGGARAN PEJABAT PENANDA TANGAN SPM	PADA BAGIAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
		KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	KUASA PENGGUNA ANGGARAN PEJABAT PENANDA TANGAN SPM	PADA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM

f

NOMOR	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	JABATAN	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN	KETERANGAN
1	2	4	5	6
2	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	PENGGUNA ANGGARAN PEJABAT PENANDA TANGAN SPM	
3	INSPEKTORAT DAERAH	INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN KATINGAN	PENGGUNA ANGGARAN PEJABAT PENANDA TANGAN SPM	
4	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	PENGGUNA ANGGARAN PEJABAT PENANDA TANGAN SPM	
5	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	PENGGUNA ANGGARAN PEJABAT PENANDA TANGAN SPM	
6	BADAN PENDAPATAN DAERAH	KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH	PENGGUNA ANGGARAN PEJABAT PENANDA TANGAN SPM	KEGIATAN SEKRETARIAT : GAJI DAN TUNJANGAN ASN, BIMTEK DAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD
		SEKRETARIS BADAN PENDAPATAN DAERAH	KUASA PENGGUNA ANGGARAN PEJABAT PENANDA TANGAN SPM	KEGIATAN PADA BIDANG SEKRETARIAT
		KEPALA BIDANG PENDAFTARAN, PENDATAAN, PENILAIAN, PERHITUNGAN, PENETAPAN DAN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN PEJABAT PENANDA TANGAN SPM	KEGIATAN PADA BIDANG PENDAFTARAN, PENDATAAN, PENILAIAN, PERHITUNGAN, PENETAPAN DAN KEBERATAN
		KEPALA BIDANG PELAYANAN, SISTEM INFORMASI, PEMBUKUAN DAN PELAPORAN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN PEJABAT PENANDA TANGAN SPM	KEGIATAN PADA BIDANG PELAYANAN, SISTEM INFORMASI, PEMBUKUAN DAN PELAPORAN
		KEPALA BIDANG PENAGIHAN, PEMERIKSAAN DAN PENYELESAIAN PIUTANG	KUASA PENGGUNA ANGGARAN PEJABAT PENANDA TANGAN SPM	KEGIATAN PADA BIDANG PENAGIHAN PEMERIKSAAN DAN PIUTANG
		KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN PENDAPATAN DAERAH	KUASA PENGGUNA ANGGARAN PEJABAT PENANDA TANGAN SPM	KEGIATAN PADA BIDANG PENGEMBANGAN PENDAPATAN DAERAH
7	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN, DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	PENGGUNA ANGGARAN PEJABAT PENANDA TANGAN SPM	
8	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PENGGUNA ANGGARAN PEJABAT PENANDA TANGAN SPM	

NOMOR	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	JABATAN	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN	KETERANGAN
1	2	4	5	6
9	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	PENGGUNA ANGGARAN PEJABAT PENANDA TANGAN SPM	
10	DINAS PENDIDIKAN	KEPALA DINAS PENDIDIKAN	PENGGUNA ANGGARAN PEJABAT PENANDA TANGAN SPM	
11	DINAS KESEHATAN	KEPALA DINAS KESEHATAN	PENGGUNA ANGGARAN PEJABAT PENANDA TANGAN SPM	
		DIREKTUR RSUD MAS AMSYAR	KUASA PENGGUNA ANGGARAN PEJABAT PENANDA TANGAN SPM	KEGIATAN PADA RSUD MAS AMSYAR
		KEPALA BIDANG PELAYANAN KESEHATAN DAN SUMBER DAYA KESEHATAN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN PEJABAT PENANDA TANGAN SPM	KEGIATAN PADA BIDANG PELAYANAN KESEHATAN DAN SUMBER DAYA KESEHATAN
		KEPALA BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT	KUASA PENGGUNA ANGGARAN PEJABAT PENANDA TANGAN SPM	KEGIATAN PADA BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
		DIREKTUR RS PRATAMA TUMBANG SAMBA	KUASA PENGGUNA ANGGARAN PEJABAT PENANDA TANGAN SPM	KEGIATAN PADA RS PRATAMA TUMBANG SAMBA
		KEPALA UPTD PUSKESMAS PEGATAN I	KUASA PENGGUNA ANGGARAN PEJABAT PENANDA TANGAN SPM	KEGIATAN PADA UPTD PUSKESMAS PEGATAN I
		KEPALA UPTD PUSKESMAS PEGATAN II	KUASA PENGGUNA ANGGARAN PEJABAT PENANDA TANGAN SPM	KEGIATAN PADA UPTD PUSKESMAS PEGATAN II
		KEPALA UPTD PUSKESMAS MENDAWAI	KUASA PENGGUNA ANGGARAN PEJABAT PENANDA TANGAN SPM	KEGIATAN PADA UPTD PUSKESMAS MENDAWAI
		KEPALA UPTD PUSKESMAS BAUN BANGO	KUASA PENGGUNA ANGGARAN PEJABAT PENANDA TANGAN SPM	KEGIATAN PADA UPTD PUSKESMAS BAUN BANGO
		KEPALA UPTD PUSKESMAS PETAK BAHANDANG	KUASA PENGGUNA ANGGARAN PEJABAT PENANDA TANGAN SPM	KEGIATAN PADA UPTD PUSKESMAS PETAK BAHANDANG

f

NOMOR	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	JABATAN	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN	KETERANGAN
1	2	4	5	6
11	DINAS KESEHATAN	KEPALA UPTD PUSKESMAS KASONGAN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN PEJABAT PENANDA TANGAN SPM	KEGIATAN PADA UPTD PUSKESMAS KASONGAN
		KEPALA UPTD PUSKESMAS KASONGAN II	KUASA PENGGUNA ANGGARAN PEJABAT PENANDA TANGAN SPM	KEGIATAN PADA UPTD PUSKESMAS KASONGAN II
		KEPALA UPTD PUSKESMAS KERENG PANGI	KUASA PENGGUNA ANGGARAN PEJABAT PENANDA TANGAN SPM	KEGIATAN PADA UPTD PUSKESMAS KERENG PANGI
		KEPALA UPTD PUSKESMAS PENDAHARA	KUASA PENGGUNA ANGGARAN PEJABAT PENANDA TANGAN SPM	KEGIATAN PADA UPTD PUSKESMAS PENDAHARA
		KEPALA UPTD PUSKESMAS BUNTUT BALI	KUASA PENGGUNA ANGGARAN PEJABAT PENANDA TANGAN SPM	KEGIATAN PADA UPTD PUSKESMAS BUNTUT BALI
		KEPALA UPTD PUSKESMAS TUMBANG SAMBA	KUASA PENGGUNA ANGGARAN PEJABAT PENANDA TANGAN SPM	KEGIATAN PADA UPTD PUSKESMAS TUMBANG SAMBA
		KEPALA UPTD PUSKESMAS TUMBANG KAMAN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN PEJABAT PENANDA TANGAN SPM	KEGIATAN PADA UPTD PUSKESMAS TUMBANG KAMAN
		KEPALA UPTD PUSKESMAS TUMBANG HIRAN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN PEJABAT PENANDA TANGAN SPM	KEGIATAN PADA UPTD PUSKESMAS TUMBANG HIRAN
		KEPALA UPTD PUSKESMAS TUMBANG SANAMANG	KUASA PENGGUNA ANGGARAN PEJABAT PENANDA TANGAN SPM	KEGIATAN PADA UPTD PUSKESMAS TUMBANG SANAMANG
		KEPALA UPTD PUSKESMAS TUMBANG KAJAMEI	KUASA PENGGUNA ANGGARAN PEJABAT PENANDA TANGAN SPM	KEGIATAN PADA UPTD PUSKESMAS TUMBANG KAJAMEI
		KEPALA UPTD PUSKESMAS TUMBANG LAHANG	KUASA PENGGUNA ANGGARAN PEJABAT PENANDA TANGAN SPM	KEGIATAN PADA UPTD PUSKESMAS TUMBANG LAHANG
		KEPALA UPTD PUSKESMAS TUMBANG BARAOI	KUASA PENGGUNA ANGGARAN PEJABAT PENANDA TANGAN SPM	KEGIATAN PADA UPTD PUSKESMAS TUMBANG BARAOI

NOMOR	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	JABATAN	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN	KETERANGAN
1	2	4	5	6
12	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATA RUANG	PENGGUNA ANGGARAN PEJABAT PENANDA TANGAN SPM	
13	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN	KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN	PENGGUNA ANGGARAN PEJABAT PENANDA TANGAN SPM	-
14	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	PENGGUNA ANGGARAN PEJABAT PENANDA TANGAN SPM	-
15	DINAS SOSIAL	KEPALA DINAS SOSIAL	PENGGUNA ANGGARAN PEJABAT PENANDA TANGAN SPM	-
16	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	KEPALA DINAS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	PENGGUNA ANGGARAN PEJABAT PENANDA TANGAN SPM	-
17	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP	PENGGUNA ANGGARAN PEJABAT PENANDA TANGAN SPM	-
18	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	PENGGUNA ANGGARAN PEJABAT PENANDA TANGAN SPM	-
19	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PENGGUNA ANGGARAN PEJABAT PENANDA TANGAN SPM	-
20	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	PENGGUNA ANGGARAN PEJABAT PENANDA TANGAN SPM	-
21	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN	KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN	PENGGUNA ANGGARAN PEJABAT PENANDA TANGAN SPM	-
22	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	PENGGUNA ANGGARAN PEJABAT PENANDA TANGAN SPM	-

f

NOMOR	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	JABATAN	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN	KETERANGAN
1	2	4	5	6
23	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA	KEPALA DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA	PENGGUNA ANGGARAN PEJABAT PENANDA TANGAN SPM	-
24	DINAS PERINDUSTRIAN, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	PENGGUNA ANGGARAN PEJABAT PENANDA TANGAN SPM	-
25	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN,	PENGGUNA ANGGARAN PEJABAT PENANDA TANGAN SPM	-
26	DINAS PERHUBUNGAN DAN PERIKANAN	KEPALA DINAS PERHUBUNGAN DAN PERIKANAN	PENGGUNA ANGGARAN PEJABAT PENANDA TANGAN SPM	-
27	KECAMATAN KATINGAN KUALA	CAMAT KATINGAN KUALA	PENGGUNA ANGGARAN PEJABAT PENANDA TANGAN SPM	-
		LURAH PEGATAN HULU	KUASA PENGGUNA ANGGARAN PEJABAT PENANDA TANGAN SPM	KUASA PENGGUNA ANGGARAN KELURAHAN PEGATAN HULU
		LURAH PEGATAN HILIR	KUASA PENGGUNA ANGGARAN PEJABAT PENANDA TANGAN SPM	KUASA PENGGUNA ANGGARAN KELURAHAN PEGATAN HILIR
28	KECAMATAN KAMIPANG	CAMAT KAMIPANG	PENGGUNA ANGGARAN PEJABAT PENANDA TANGAN SPM	-
29	KECAMATAN TASIK PAYAWAN	CAMAT TASIK PAYAWAN	PENGGUNA ANGGARAN PEJABAT PENANDA TANGAN SPM	-
30	KECAMATAN KATINGAN HILIR	CAMAT KATINGAN HILIR	PENGGUNA ANGGARAN PEJABAT PENANDA TANGAN SPM	-
		LURAH KASONGAN LAMA	KUASA PENGGUNA ANGGARAN PEJABAT PENANDA TANGAN SPM	KUASA PENGGUNA ANGGARAN KELURAHAN KASONGAN LAMA
		LURAH KASONGAN BARU	KUASA PENGGUNA ANGGARAN PEJABAT PENANDA TANGAN SPM	KUASA PENGGUNA ANGGARAN KELURAHAN KASONGAN BARU

NOMOR	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	JABATAN	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN	KETERANGAN
1	2	4	5	6
31	KECAMATAN TEWANG SANGALANG GARING	CAMAT TEWANG SANGALANG GARING	PENGGUNA ANGGARAN PEJABAT PENANDA TANGAN SPM	-
		LURAH PENDAHARA	KUASA PENGGUNA ANGGARAN PEJABAT PENANDA TANGAN SPM	KUASA PENGGUNA ANGGARAN KELURAHAN PENDAHARA
32	KECAMATAN PULAU MALAN	CAMAT PULAU MALAN	PENGGUNA ANGGARAN PEJABAT PENANDA TANGAN SPM	-
33	KECAMATAN KATINGAN TENGAH	CAMAT KATINGAN TENGAH	PENGGUNA ANGGARAN PEJABAT PENANDA TANGAN SPM	-
		LURAH SAMBA KAHAYAN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN PEJABAT PENANDA TANGAN SPM	KUASA PENGGUNA ANGGARAN KELURAHAN SAMBA KAHAYAN
34	KECAMATAN SANAMAN MANTIKEI	CAMAT SANAMAN MANTIKEI	PENGGUNA ANGGARAN PEJABAT PENANDA TANGAN SPM	-
35	KECAMATAN MARIKIT	CAMAT MARIKIT	PENGGUNA ANGGARAN PEJABAT PENANDA TANGAN SPM	-
36	KECAMATAN KATINGAN HULU	LURAH TUMBANG SANAMANG	PENGGUNA ANGGARAN PEJABAT PENANDA TANGAN SPM	KUASA PENGGUNA ANGGARAN KELURAHAN TUMBANG SANAMANG
		CAMAT KATINGAN HULU	PENGGUNA ANGGARAN PEJABAT PENANDA TANGAN SPM	-
37	KECAMATAN MENDAWAI	CAMAT MENDAWAI	PENGGUNA ANGGARAN PEJABAT PENANDA TANGAN SPM	-
38	KECAMATAN BUKIT RAYA	CAMAT BUKIT RAYA	PENGGUNA ANGGARAN PEJABAT PENANDA TANGAN SPM	-
39	KECAMATAN PETAK MALAI	CAMAT PETAK MALAI	PENGGUNA ANGGARAN PEJABAT PENANDA TANGAN SPM	-



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 100.3.3.2/1/ TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN PARA PEJABAT YANG DITUNJUK DAN DIBERI WEWENANG SEBAGAI
PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PENANDATANGANAN SURAT
PERINTAH MEMBAYAR, BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA
PENGELUARAN PEMBANTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
TAHUN ANGGARAN 2025

NOMOR	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	NAMA/NIP/PANGKAT	JABATAN	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	SEKRETARIAT DAERAH	ALPIANOR, S.E. Penata Muda / III.a NIP.19770912 201212 1 001	ANALIS KEUANGAN	BENDAHARA PENGELUARAN	
		YUDEA RITOPALDA, SS. Penata Muda / III.a NIP.19980619 202203 2 013	AHLI PERTAMA/ PENERJEMAH	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	PADA BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
		FITRIA NINGSIH, S.Kom. Penata Muda / III.a NIP.19951105 202203 2 014	AHLI PERTAMA - PENGELOLA BARANG/JASA PERTAMA	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	PADA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
		RICKI, S.H., M.H. Penata / III.c NIP.19870320 202012 1006	ANALIS ADOKASI HUKUM	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	PADA BAGIAN HUKUM
		RISWANDA RAHMAN, S.H. Penata Muda / III.a NIP.19891116 202012 1 008	ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	PADA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
		DEBY HERMAWAN Pengatur Muda / II.a NIP.19930419 202203 1 005	ANALIS PEMERINTAHAN DAERAH	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	PADA BAGIAN PEMERINTAHAN
		ERIN, S.Sos. Penata Muda Tingkat I / III.b NIP. 19960723 202012 1 006	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	PADA BAGIAN ORGANISASI
		ANDIKA GEORGIA IMANUEL IKAT, S.T. Penata Muda III / a NIP.19940506 202012 1 015	ANALIS RENCANA PRODUKSI DAN PEMAMFAATAN MINERAL DAN BATUBARA	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	PADA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
		JENDRIANTO, S.Pd. Penata Tingkat I III / d NIP.19861020 201101 1 002	PENYUSUN RENCANA KEHUMASAN DAN PERPUSTAKAAN	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	PADA BAGIAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
2	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	SITI YULIANIE Pengatur / II.c NIP. 19840616 201406 2 004	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	BENDAHARA PENGELUARAN	-
3	INSPEKTORAT DAERAH	AMALIA MAYMUNA R S.Sos Penata Muda / III.a NIP. 19780911 201212 2 002	FUNGSIONAL UMUM	BENDAHARA PENGELUARAN	-

NOMOR	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	NAMA/NIP/PANGKAT	JABATAN	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
4	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	IIN NATALIA, S.T. Penata / III.c NIP. 19791226 201406 2 005	FUNGSIONAL UMUM	BENDAHARA PENGELUARAN	-
5	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	ANTONIUS, SE Penata Muda Tingkat I / III.b NIP. 19790708 201001 1 005	PRANATA KOMPUTER	BENDAHARA PENGELUARAN	-
6	BADAN PENDAPATAN DAERAH	ITHAE SOESILAE, A.Md Penata Muda Tingkat I / III.b NIP. 19770830 201001 2 002	FUNGSIONAL UMUM	BENDAHARA PENGELUARAN	KEGIATAN SEKRETARIAT : GAJI DAN TUNJANGAN ASN, BIMTEK DAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD
		WIKTAPIA, A.Md Penata / III.c NIP. 19791010 200604 2 027	VERIFIKATUR KEUANGAN	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	PADA BAGIAN SEKRETARIAT
		YOSEP ADRIANUS Penata Muda / III.a NIP. 19690427 200604 1 006	FUNGSIONAL UMUM	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	BIDANG PENDAFTARAN, PENDATAAN, PENILAIAN, PERHITUNGAN, PENETAPAN BIDANG PELAYANAN, SISTEM INFORMASI, PEMBUKUAN DAN PELAPORAN
		FAHROZI Penata Muda Tingkat I / III.b NIP. 19690427 200604 1 006	FUNGSIONAL UMUM	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	PADA BIDANG PENAGIHAN PEMERIKSAAN DAN PIUTANG BIDANG PENGEMBANGAN PENDAPATAN DAERAH
7	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	NURIYAH SARI DEWI, A.Md Pengatur Tingkat I / II.d NIP. 19950424 202012 2 031	PELAKSANA	BENDAHARA PENGELUARAN	-
8	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	ALBERTO, A.Md. Penata Muda Tingkat I / III.b NIP. 19800407 201001 1 014	PENELAAH TEKNIK KEBIJAKAN	BENDAHARA PENGELUARAN	-
9	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	ASRIN, S.M. Penata Muda / III.a NIP. 19960828 202012 1 010	PENYUSUNAN RENCANA KEBUTUHAN LOGISTIK	BENDAHARA PENGELUARAN	-
10	DINAS PENDIDIKAN	YURNI Pengatur / II.c NIP. 19830210 201212 2 003	PELAKSANA	BENDAHARA PENGELUARAN	-

NOMOR	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	NAMA/NIP/PANGKAT	JABATAN	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
11	DINAS KESEHATAN	M. NAJIB ZAMZAM, S. Farm Penata Muda Tingkat I / III.b NIP. 19890211 201101 1 001	PELAKSANA	BENDAHARA PENGELUARAN	-
		FRANSISKA MEIDA, S.Kep Penata Muda / III.a NIP.199105212014022004	PELAKSANA	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU BIDANG PELAYANAN KESEHATAN DAN SUMBER DAYA KESEHATAN	BIDANG PELAYANAN KESEHATAN DAN SUMBER DAYA KESEHATAN
		YUSTIKA RINNY, A.Md Penata / III.c NIP. 198204272008042005	PELAKSANA	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT	BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
		YUNIKE NINGSIH, S.M Penata Muda Tingkat I / III.b NIP. 19810610 201001 2 007	PELAKSANA	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU RSUD MAS AMSYAR	RSUD MAS AMSYAR
		MARLINA SRIWAHYULIE, A.Md.Kep Penata Muda Taingkat I / III.b NIP. 19910317 201402 2 003	PRANATA LAB KESEHATAN MAHIR	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU RS PRATAMA TUMBANG SAMBA	RS PRATAMA TUMBANG SAMBA
		DEDE HERAWATI S., A.Md.Keb Pengatur / II.c NIP. 19891107 202012 2 016	BIDAN TERAMPIL	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU UPTD KESEHATAN PUSKESMAS PEGATAN 1	UPTD KESEHATAN PUSKESMAS PEGATAN 1
		IKA JAYANTHI, M, A.Md.Keb Penata / III.c NIP. 19900126 201101 2 001	BIDAN MAHIR	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU UPTD KESEHATAN PUSKESMAS PEGATAN II	UPTD KESEHATAN PUSKESMAS PEGATAN II
		HARY WIBOWO HODALIANTO, A.Md. Pengatur, II/c NIP. 19901123 202203 1 003	PERAWAT TERAMPIL	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU UPTD KESEHATAN PUSKESMAS MENDAWAI	UPTD KESEHATAN PUSKESMAS MENDAWAI
		YULIA WIDIASTUTI, A.Md.Kep Penata Muda / III.a NIP. 19910730 201402 2 007	PERAWAT MAHIR	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU UPTD KESEHATAN PUSKESMAS BAUN BANGO	UPTD KESEHATAN PUSKESMAS BAUN BANGO
		ASRI PRILIANI, A.Md.KL Pengatur Tingkat I / II.d NIP. 19950612 201903 2 021	PERAWAT MAHIR	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU UPTD KESEHATAN PUSKESMAS PETAK BAHANDANG	UPTD KESEHATAN PUSKESMAS PETAK BAHANDANG
		AGUSTINA, A.Md.Kep Pengatur / II.c NIP. 19930818 202012 2 017	NUTRISIONIS AHLI MUDA	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU UPTD KESEHATAN PUSKESMAS KASONGAN	UPTD KESEHATAN PUSKESMAS KASONGAN
		RITAE ELVIRAE SRIRAHAYU, SE Penata Muda / III.a NIP. 19980722 202203 2 014	PENATA LAPORAN KEUANGAN	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU UPTD KESEHATAN PUSKESMAS KASONGAN II	UPTD KESEHATAN PUSKESMAS KASONGAN II
		IKA NAHDA HIDAYANTI, A.Md,Keb Penata Muda / III.a NIP. 19891223 201402 2 003	BIDANG TERAMPIL	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU UPTD KESEHATAN PUSKESMAS KERENG PANGI	UPTD KESEHATAN PUSKESMAS KERENG PANGI
		RIA OKTAVIANI, A.Md.Kg Penata Muda Tk. I / III.b NIP. 19891016 201402 2 003	PERAWAT GIGI MAHIR	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU UPTD KESEHATAN PUSKESMAS PENDAHARA	UPTD KESEHATAN PUSKESMAS PENDAHARA
		YESIE APRANENI, A.Md.Gizi Penata / III.c NIP. 198704162010012003	NUTRISIONIS PENYELIA	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU UPTD KESEHATAN PUSKESMAS BUNTUT BALI	UPTD KESEHATAN PUSKESMAS BUNTUT BALI

NOMOR	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	NAMA/NIP/PANGKAT	JABATAN	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
11	DINAS KESEHATAN	DELTA MARGARET, S.Kep., Ners Penata Muda Tingkat I / III.b NIP. 19890116 201101 2 002	PRANATA LAB KESEHATAN MAHIR	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU UPTD KESEHATAN PUSKESMAS TUMBANG SAMBA	UPTD KESEHATAN PUSKESMAS TUMBANG SAMBA
		ESTY PILARENSI, SKM Pengatur Tkl. I, II/d NIP. 19930430 201503 1 003	PERAWAT MAHIR	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU UPTD KESEHATAN PUSKESMAS TUMBANG KAMAN	UPTD KESEHATAN PUSKESMAS TUMBANG KAMAN
		SIPTO KAMBER, A.Md, Farm Pengatur Tingkat I / II.d NIP. 19960224 201903 1 006	ASISTEN APOTEKER TERAMPIL	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU UPTD KESEHATAN PUSKESMAS TUMBANG HIRAN	UPTD KESEHATAN PUSKESMAS TUMBANG HIRAN
		NIDA KRISNAWATI, A.Md.Keb Penata Muda / III.a NIP. 19901120 201405 2 002	BIDAN MAHIR	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU UPTD KESEHATAN PUSKESMAS TUMBANG SANAMANG	UPTD KESEHATAN PUSKESMAS TUMBANG SANAMANG
		M. SUKMA MUTA'AL AMIN, SKM Penata Muda Tk. I / III.b NIP. 19980817 202203 1 006	PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU UPTD KESEHATAN PUSKESMAS TUMBANG KAJAMEI	UPTD KESEHATAN PUSKESMAS TUMBANG KAJAMEI
		NICKY ARDIAN, A.Md Kep Pengatur Tingkat I / II.d NIP. 19900909 202203 1 007	PERAWAT TERAMPIL	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU UPTD KESEHATAN PUSKESMAS TUMBANG LAHANG	UPTD KESEHATAN PUSKESMAS TUMBANG LAHANG
		YOSISEPRIANI, A.Md.Keb Pengatur Tingkat I / II.d NIP. 19940906 202203 2 019	BIDAN MAHIR	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU UPTD KESEHATAN PUSKESMAS TUMBANG BARAOI	UPTD KESEHATAN PUSKESMAS TUMBANG BARAOI
12	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	ERY SANJAYA, S.E Penata Muda / III.a NIP. 19710810 200701 1 027	PELAKSANA	BENDAHARA PENGELUARAN	-
13	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN	HETTY KUSENDANG, S.Hut. Penata Tk. I / III.d NIP. 19781230 200701 2 012	PELAKSANA	BENDAHARA PENGELUARAN	-
14	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	CAHYO DAHONO Penata Muda / III.a NIP. 19760823 200604 1 014	PELAKSANA	BENDAHARA PENGELUARAN	-
15	DINAS SOSIAL	GISMINIE Pengatur / II.c NIP. 19731212 2012 2 002	FUNSIONAL UMUM	BENDAHARA PENGELUARAN	-
16	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	SILVY WARDENIATY, A.Md. Penata Muda Tingkat I / III.b NIP. 19800326 201001 2 010	PENELAHAH TEKNIK KEBIJAKAN	BENDAHARA PENGELUARAN	-
17	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	SRI LESTARI, S.Hut Penata Muda / III.a NIP. 19830311 200801 2 016	PELAKSANA	BENDAHARA PENGELUARAN	-
18	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	MICKY ZAKARIANO LADJU, S.Sos Penata Muda Tk I / III.b NIP. 19831118 201101 1 003	PELAKSANA	BENDAHARA PENGELUARAN	-

NOMOR	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	NAMA/NIP/PANGKAT	JABATAN	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
19	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	RENA SUSILAWATI Pengatur Tingkat I / II.d NIP. 19800113 200904 2 001	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	BENDAHARA PENGELUARAN	-
20	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	KASIDI, S.Kom Penata Muda Tingkat I / III.b NIP. 19880130 202012 1 007	PELAKSANA	BENDAHARA PENGELUARAN	-
21	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN	KAMLIN, S.Sos Penata Muda / III.a NIP. 19830711 201406 1 003	ANALIS PERDAGANGAN	BENDAHARA PENGELUARAN	-
22	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	JALI Pengatur Tk. I / II.d NIP.19811015 200904 1 002	PELAKSANA	BENDAHARA PENGELUARAN	-
23	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA	ERLINA KURNIASIH W. S.Si. Penata / III.c NIP. 19881011 201503 2 005	PENELAAH KEBIJAKAN AHLI MUDA	BENDAHARA PENGELUARAN	-
24	DINAS PERINDUSTRIAN, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	MARTHA APRITHA, S.E. Penata / III.c NIP. 19760419 200604 2 004	PELAKSANA	BENDAHARA PENGELUARAN	-
25	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	NORFITRIA NINGSIH, A.Md. Penata Muda Tingkat Tk. I/ III.b NIP. 19790516 201001 2 007	PELAKSANA	BENDAHARA PENGELUARAN	-
26	DINAS PERHUBUNGAN DAN PERIKANAN	AFRIA WANTIRIA, S.Sos Penata Muda / III.a NIP. 19800426 200701 1 006	PELAKSANA	BENDAHARA PENGELUARAN	-
27	KECAMATAN KATINGAN KUALA	MANSYAH Pengatur / II.c NIP.19670825 200701 1 027	PELAKSANA	BENDAHARA PENGELUARAN	-
		SITI NURBAITI, A.Md. Pengatur / II.c NIP. 19781002 201406 2 002	PELAKSANA	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	KELURAHAN PEGATAN HULU
		AHMAD IRWANTO Pengatur Tk I/ II.d NIP. 198307272007011007	PELAKSANA	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	KELURAHAN PEGATAN HILIR
28	KECAMATAN KAMIPANG	NORLAILA Pengatur Tingkat I / II.d NIP.19860324 201001 2 003	PELAKSANA	BENDAHARA PENGELUARAN	-

NOMOR	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	NAMA/NIP/PANGKAT	JABATAN	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
29	KECAMATAN TASIK PAYAWAN	YONO, S.Sos Penata Muda / III.a NIP. 198302042008011005	PELAKSANA	BENDAHARA PENGELUARAN	-
30	KECAMATAN KATINGAN HILIR	DESNIATI, S.Sos Penata Muda / III.a NIP.19721231 201406 2 005	PELAKSANA	BENDAHARA PENGELUARAN	-
		BENI YUSTINA, A.Md Penata Muda / III.a NIP. 19820929 201101 2 002	PELAKSANA	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	KELURAHAN KASONGAN LAMA
		EMELIA Penata Muda Tk. I / III.b NIP. 19690908 198902 2 002	PELAKSANA	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	KELURAHAN KASONGAN BARU
31	KECAMATAN TEWANG SANGALANG GARING	SUPARMAN Penata Muda / III.a NIP. 197106302007011021	PELAKSANA	BENDAHARA PENGELUARAN	-
		LEGIE Penata Muda / III.a NIP. 19680413 200701 1 044	PELAKSANA	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	KELURAHAN PENDAHARA
32	KECAMATAN PULAU MALAN	SINSO, S.E Penata Muda / III.a NIP. 19740505 201001 1 008	PELAKSANA	BENDAHARA PENGELUARAN	-
33	KECAMATAN KATINGAN TENGAH	MARDY Pengatur Tingkat I / II.d NIP.197608052010011004	PELAKSANA	BENDAHARA PENGELUARAN	-
		WAWAN HARI KURNIAWAN, S.K.M. NIP. 19861028 200904 1 001	KASIE PEMBANGUNAN	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	KELURAHAN SAMBA KAHAYAN
34	KECAMATAN SANAMAN MANTIKEI	KARPILU Pengatur / II.c NIP. 19770327 201406 1 002	PELAKSANA	BENDAHARA PENGELUARAN	-
35	KECAMATAN MARIKIT	ALES DI Tingkat I / I.d 19771018 200906 1 003	Juru NIP. PELAKSANA	BENDAHARA PENGELUARAN	-
36	KECAMATAN KATINGAN HULU	HENDRA BRIAGA, S.Sos Penata Muda / III.a NIP. 19920224 202203 1 006	PELAKSANA	BENDAHARA PENGELUARAN	-
		RAWEI Pengatur, / II.c NIP. 19690613 200906 1 001	PELAKSANA	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	KELURAHAN TUMBANG SANAMANG

NOMOR	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	NAMA/NIP/PANGKAT	JABATAN	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
37	KECAMATAN MENDAWAI	SUROYO SISWO RAHARJO Pengatur Tk. I/ II.d NIP. 19781215 201001 1 013	PELAKSANA	BENDAHARA PENGELUARAN	-
38	KECAMATAN BUKIT RAYA	PRISWADIE Pengatur Tingkat I / II.d NIP. 19730404201001 1 004	PELAKSANA	BENDAHARA PENGELUARAN	-
39	KECAMATAN PETAK MALAI	OBIE ESSER, SE Penata Muda / III.a NIP. 19850810 201402 1 002	PELAKSANA	BENDAHARA PENGELUARAN	-

